

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sebuah perusahaan tentunya mempunyai masalah dalam menyusun laporan keuangan. Dengan adanya masalah tersebut maka harus diperlukan sebuah pengelolaan yang dapat mempermudah dalam melakukan kegiatan agar mengurangi resiko yang terjadi atau mencegahnya penyimpangan pada perusahaan atau instansi.

Kinerja sebuah instansi harus dilaksanakan dalam program kerja yang wajib dijalankan pada masa periode tersebut. Jika kinerja yang dikerjakan tidak mutlak dalam pengerjaannya, maka hal tersebut akan mustahil pada proses pengerjaannya. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui asas desentralisasi, otonomi daerah hadir untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sendiri urusan pemerintahan dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah.

Selanjutnya, dalam urusan keuangan, diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah dengan pemerintah daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah didasarkan atas penyerahan tugas kepada pemerintah



daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. otonomi daerah telah lama menjadi wacana publik Indonesia.

Mengingat banyaknya sumber-sumber pendapatan asli daerah yang bisa dioptimalkan, daerah otonom tidak perlu mengandalkan dana perimbangan dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Pengelolaan kekayaan alam itu berbanding lurus dengan peningkatan jumlah wajib pajak dan retribusi daerah. Pendapatan asli daerah pengaruhnya sangat penting untuk menunjang peningkatan aktifitas suatu instansi pemerintahan sebab susunan perkiraannya yang saling berimbang. Serta fungsi utama yang dapat membangun produktifitas sebuah instansi tersebut.

Kabupaten ini menyimpan kekayaan alam di sektor seperti perkebunan, pertanian, peternakan, pertambangan, dan pariwisata yang melimpah yang bisa dikelola untuk menambah sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai secara mandiri urusan rumah tangga daerah. Sektor-sektor potensial ini jika dikelola secara maksimal akan membantu mempercepat pertumbuhan perekonomian masyarakat yang pada gilirannya akan menambah jumlah objek. Melihat potensi kekayaan Kab. Lubuk Basung sebagaimana diuraikan di atas, Dinas Pendapatan, Keuangan dan aset daerah dalam pengelolaan pendapatan asli daerah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), berpeluang besar untuk mengoptimalkan manajemen keuangan daerah hasil penerimaan dari sumber-sumber PAD.

Dalam hal ini, dituntut efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kinerja dinas dalam manajemen keuangan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kecerdasan pengelolaan penerimaan keuangan dibutuhkan untuk memastikan



semua pos anggaran pembelanjaan daerah dalam setiap tahun anggaran mendapat bagian secara proporsional. Selain itu, juga untuk menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam setiap tahun anggaran. Dalam hal strategi, apakah pemerintah daerah telah mengubah strategi mengenai teknis operasional lapangan terutama sistem pendataan ulang dalam rangka menjangkau semaksimal mungkin obyek pajak maupun subyek pajak sebagai dasar perhitungan dan pengenaan pajak.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, apakah pemerintah Kab. Agam Lubuk Basung melalui Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset dalam pengelolaan pendapatan asli daerah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap seluruh sumber penerimaan daerah, telah mengidentifikasi secara optimal sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru. Atas dasar ini, penulis melakukan penelitian tentang bagaimana peranan salah satu SKPD yang banyak bergelut dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan topik pengelolaan pendapatan asli daerah mengangkat judul **"KINERJA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KAB. JAGAM DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH"**.



1.2 Rumusan Masalah

Adapun masalah yang dikemukakan kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Agam dalam pengelolaan pendapatan asli daerah ini, penulis memfokuskan pembahasan mengenai:

1. Bagaimana proses kinerja dalam pengelolaan pendapatan asli daerah yang dilaksanakan oleh DPPKA Kab. Agam?

2. Bagaimana pengelolaan pendapatan asli daerah yang dilaksanakan oleh DPPKA Kab. Agam dalam periode 2012, 2013, 2014, 2015?
3. Bagaimana tahapan evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan pendapatan asli daerah yang dilaksanakan oleh DPPKA di Kab. Agam?

1.3 Tujuan Kegiatan Magang

1. Untuk mengetahui dan memahami proses kinerja dalam pengelolaan pendapatan asli daerah yang dilaksanakan oleh DPPKA Kab. Agam
2. Untuk mengetahui dan memahami pengelolaan pendapatan asli daerah yang dilaksanakan oleh DPPKA Kab. Agam
3. Untuk mengetahui dan memahami tahapan evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan pendapatan asli daerah yang dilaksanakan oleh DPPKA Kab. Agam .
4. Sebagai syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi pada Program Studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas.



1.4 Manfaat Magang

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan magang, sebagai berikut :

1. Bagi penulis
 1. Sebagai sarana latihan dan aplikasi teori-teori yang didapat pada saat perkuliahan kedalam praktek kerja yang sesungguhnya.
 2. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang pekerjaan di lapangan kerja.
 3. Meningkatkan kreatifitas dan keterampilan.

4. Mendapatkan pengalaman untuk menghadapi dunia kerja dimasa akan datang.
2. Bagi Instansi Pemerintah (Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah)

Dengan adanya magang yang merupakan sarana yang baik untuk menjembatani instansi pemerintah dengan lembaga pendidikan untuk dapat bekerjasama lebih lanjut mengenai riset dan penelitian. Instansi juga dapat menilai potensi mahasiswa untuk direkrut menjadi pegawai.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan : Menjelaskan secara garis besar Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Magang, Manfaat Magang dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

BAB II Landasan Teori : Menguraikan landasan teori secara lebih rinci mengenai, landasan hukum, pengertian kinerja, tujuan kinerja, pengelolaan pendapatan asli daerah, tahapan evaluasi dan pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja dan pengelolaan pendapatan asli daerah.

BAB III Gambaran Umum Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kab. Agam : Membahas tentang Gambaran Umum Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kab. Agam, Sejarah berdirinya, Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), Visi dan Misi Tujuan Sasaran, Struktur Organisasi, dan Kebijakan Umum.



BAB IV Pembahasan : Menjelaskan tentang uraian dan pembahasan mengenai kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Agam dalam pengelolaan pendapatan asli daerah.

BAB V Penutup : Berisikan kesimpulan tugas akhir yang terkait dengan tujuan dari pelaksanaan dan pembuatan tugas akhir. Juga berisikan kritik dan saran yang dapat menjadi input bagi instansi dan pihak-pihak terkait di masa yang akan datang.

